

**URGENSI PENGATURAN SANKSI PIDANA  
DALAM LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MIRACLE M. A. A. S. SIHOMBING**

**NIM. 0910113145**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Artikel Ilmiah** : **URGENSI PENGATURAN SANKSI PIDANA  
DALAM LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI  
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**Identitas Penulis**

a. Nama : **Miracle M. A. A. S. Sihombing**

b. NIM : **0910113145**

:

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **6 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama



Eny Harjati, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Pembimbing Pendamping



Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.  
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

## ABSTRAKSI

Miracle M.A.A.S. Sihombing, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, URGENSI PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Eny Harjati S.H., M.Hum, Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi penelitian penulis di KPK, saat Kuliah Kerja Lapangan. Hambatan KPK dalam mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah sanksinya yang hanya administratif. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan *statute approach* dan *comparative approach*. Hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa pengaturan sanksi bagi penyelenggara Negara yang tidak menyerahkan LHKPN terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, PP Nomor 53 Tahun dan dalam pasal 216, pasal 263 dan 416 KUHP bagi penyelenggara Negara yang dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaannya. Sanksi administrative dianggap terlalu lemah karena KPK tidak mempunyai hak untuk menetapkan sanksi, sanksi administrative tidak mengikat bagi seluruh penyelenggara Negara. Sanksi pidana yang ada dalam KUHP, dianggap dikesampingkan dengan berlakunya asas *lex specialis* dengan adanya pasal 20 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 1999. Penulis mencoba memberikan saran rumusan pasal beserta sanksi pidana dengan perbandingan dari pengaturan sanksi pidana di beberapa Negara dan sanksi pidana yang telah ada dalam peraturan di Indonesia.

Miracle M.A.A.S. Sihombing, Criminal Law, Law Faculty of Brawijaya University, February 2013, THE URGENCY OF CRIMINAL SANCTIONS ARRANGEMENT IN ASSETS DISCLOSURE OF THE STATE OFFICIALS FOR PREVENTING CORRUPTION, Eny Harjati S.H., M.Hum, Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

The author raises the issue motivated by the author is study during the obligatory social action internship for advanced university students at the Corruption Eradication Commission (KPK) office, about the implementation of Assets Disclosure of the State Officials and that the barriers of the implementation lies in the law sanctions, only giving administrative sanctions. This paper uses normative juridical method with statute legislation approach and co,parative approach. The result, the author obtained that setting penalties for the public officials who do not submit LHKPN found in Ordinance 28 of 1999, Government Regulation Number 53 of 2010 and in Article 216 of the Criminal Code and Articles 263 and 416 of the Criminal Code for the public officials who deliberately misreport their assets disclosure. Administrative sanction is supposed too weak because the Commission (KPK) did not have the right to give penalties, besides the administrative sanctions are not binding the entire public officials. Criminal sanctions actually exist in the Criminal Code, but is considered overridden by the force of the principle of *lex specialist* with the article 20 paragraph 1 of Ordinance 28 of 1999 which states the punishment for the disobedient public officials reporting their assets disclosure is administrative sanctions. The author tries to give advice to criminal sanctions formulation section along with a comparison of setting criminal penalties in some other countries and criminal sanctions that already exist in the regulations in Indonesia.

Kata Kunci : Urgensi Sanksi Pidana, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN

Korupsi menurut Eep Saefulloh Fattah adalah penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga yang melampaui batas-batas yang dibuat oleh hukum.<sup>1</sup> Salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN). UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, sehingga dapat mencegah pemasukan kekayaan yang mencurigakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara Negara tersebut. Selain itu untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan tercela lainnya.<sup>2</sup>

Penelitian penulis di KPK<sup>3</sup> mengenai “Pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, pada Maret 2012 menjelaskan bahwa pelaksanaan LHKPN berjalan dengan baik meski tidak mungkin berjalan 100%. Ada juga penyelenggara yang tidak taat dalam melaporkan harta kekayaannya. Sebagai contoh, Aryanto Sutadi (pensiunan Jenderal Polisi) yang masuk daftar 8 orang yang lolos seleksi panitia Seleksi Pimpinan KPK tahun 2011. Pada saat wawancara dengan DPR, Aryanto mengakui merekayasa LHKPN serta termasuk penyelenggara Negara yang tidak taat melaporkan harta kekayaan. Pasal 20 UU No. 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa : *“Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1,2,3,4,5, atau 6 dikenakan sanksi*

---

<sup>1</sup> Deni Marmos., 2011, *Korupsi (online)*, <http://denimarmos.Blogspot.com/2011/09/korupsi.html> (Jumat, 26 Juli 2012 pukul 11:49 WIB)

<sup>2</sup> Arhiem, *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(online)*, [http://hukumperbankan.blogspot.com/2009/07/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara\\_24.html](http://hukumperbankan.blogspot.com/2009/07/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara_24.html) (Kamis, 23 Agustus 2012 pukul 21.03)

<sup>3</sup> Miracle M. A. A. S. Sihombing, Laporan Kuliah Kerja Lapangan, *Pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Laporan KKL tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hal 34.

*administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.” Sedangkan kewajiban yang dimaksud dari pasal 5 ayat 3 adalah : “setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk : melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat”*

KPK yang mempunyai kewenangan mengenai LHKPN, hanya dapat memberikan masukan bagi atasan instansi/lembaga wajib LHKPN yang tidak taat tersebut untuk mendapat sanksi administratif. Sanksi yang hanya administratif dan hanya dapat diberikan oleh instansi yang terkait merupakan sebuah hambatan bagi KPK, khususnya dalam pelaksanaan LHKPN.<sup>4</sup> Selain itu, undang-undang tersebut hanya memberikan sanksi bagi yang tidak taat dalam pelaporan harta kekayaannya, padahal tidak menutup kemungkinan, Wajib LHKPN tersebut sengaja salah melaporkan harta kekayaannya. Penyelenggara Negara lain yang sudah melepaskan masa jabatannya, juga sulit dikenakan sanksi administrasi lagi bila setelah menjabat tidak melaporkan LHKPN. Khususnya karena yang bersangkutan statusnya bukan penyelenggara lagi dan tidak terikat dengan sanksi administratif. Kekosongan sanksi hukum bagi penyelenggara yang dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaan dan adanya kesulitan menerapkan sanksi administratif ini menurut penulis, merupakan sebuah momentum untuk adanya pengaturan sanksi hukum lainnya, yakni hukum pidana dalam LHKPN.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan sanksi dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi penyelenggara negara yang tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya maupun penyelenggara Negara yang dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaannya?
2. Apa urgensi pengaturan sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya maupun penyelenggara Negara yang dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaannya?
3. Bagaimana pengaturan sanksi pidana dalam mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi?

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal 36.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>5</sup> Pendekatan penelitian ini adalah<sup>6</sup> Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer (berbagai peraturan perundang-undangan), sekunder (beberapa buku teks yang terkait dengan permasalahan yang penulis buat), dan tersier (petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain).<sup>7</sup> Analisa bahan hukumnya yakni dengan metode deskriptif-analisis dikaitkan pada asas-asas hukum dan berdasar pada teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan yang ingin penulis bahas. Penelitian ini menggunakan interpretasi teleologis atau sosiologis,<sup>8</sup> yaitu menganggap makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, sehingga kekosongan hukum yang ada dianalisis dan ditemukan solusinya demi tujuan kemasyarakatan.

## PEMBAHASAN

### **A. Pengaturan Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Bagi Penyelenggara Negara yang Tidak Menyerahkan Laporan Harta Kekayaannya Maupun Penyelenggara Negara yang dengan Sengaja Salah Melaporkan Harta Kekayaan**

#### **1. Sanksi Administratif dalam UU Nomor 28 Tahun 1999**

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Setiap penyelenggara Negara mempunyai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. Sekalipun

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 14

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 93

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005. hal 296

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005. Hal 171

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

begitu, nyatanya masih banyak penyelenggara Negara yang tidak tertib. Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 1999, menyatakan bahwa : “Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

UU Nomor 28 Tahun 1999 memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai sanksi administrative. Bila kita berbicara mengenai sanksi administratif, tidak dapat kita lepaskan dari peraturan perundang-undangan yang juga mengatur mengenai pegawai negeri dan pejabat Negara. Pegawai negeri maupun pejabat Negara diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang merupakan perubahan atas UU nomor 8 Tahun 1974. Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 menjelaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, bila dapat kita simpulkan, sanksi administratif yang dimaksud dalam pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 khususnya mengenai penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya akan merujuk pada sanksi-sanksi dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

## **2. Sanksi Administratif dalam PP Nomor 53 Tahun 2010**

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.<sup>10</sup> Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri karena melanggar Disiplin PNS. Dari segi tingkat hukumannya, hukuman disiplin dibedakan atas

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.<sup>11</sup> Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.<sup>12</sup> Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk :

- ...
1. Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

...

Hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.<sup>13</sup> Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk:

- ...
1. Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

...

Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindaahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, hingga Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>14</sup> Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk:

---

<sup>11</sup> Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>12</sup> Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>13</sup> Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>14</sup> Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



1. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negative pada pemerintah dan/atau negara;

...

Ayat (3) Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 ini menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. Sedangkan pada ayat (4) nya ialah setiap pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan. Dari kedua ayat diatas, dapat kita simpulkan bahwa tidak melaporkan LHKPN ialah merupakan sebuah pelanggaran atas kewajiban bagi pegawai negeri, khususnya ialah bagi penyelenggara Negara. Bila melihat penjelasan diatas mengenai criteria dan beratnya jenis hukuman, tidak melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara Negara dapat dikenai hukuman mulai hukuman baik hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

### **3. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

KUHP ternyata juga mengatur mengenai kewajiban setiap orang untuk menuruti perintah peraturan perundang-undangan meskipun tidak secara spesifik mengenai kewajiban melaporkan harta kekayaan. Peraturan tersebut berada dalam pasal 216 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)<sup>15</sup> yang menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan UU yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

...

Unsur tidak mentaati perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, bila kita kaitkan dengan mekanisme LHKPN dapat dijelaskan bahwa Pasal 5 ayat 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 memberikan kewajiban bagi

---

<sup>15</sup> Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

penyelenggara Negara untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya. Kata “wajib” dalam pasal ini merupakan sebuah bentuk permintaan atau perintah bagi pihak yang terkait, dalam hal ini Penyelenggara Negara. Sehingga, dalam hal mekanisme LHKPN apabila tidak melaporkan kekayaannya termasuk suatu perbuatan yang tidak mentaati perintah/permintaan yang dilakukan menurut undang-undang. Sedangkan unsur pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, menurut Pasal 13 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (KPK), KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Sehingga unsur pejabat dalam mekanisme LHKPN ini yang tugasnya mengawasi sesuatu ialah pejabat dalam Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelaksanaan mekanisme LHKPN ini tidak menutup kemungkinan ada penyelenggara Negara yang dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaannya, hal ini sekilas dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan ini, dapat berupa menyembunyikan kekayaan tertentu, mengubah asal-usul kekayaan dari yang sebenarnya, mengurangi nominal kekayaan tertentu secara sepihak, dan praktek-praktek lainnya.<sup>16</sup>

KPK menerbitkan formulir LHKPN yang akan diisi oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan mengenai harta kekayaan beserta dengan asal-usul hartanya dan akan dikembalikan kepada KPK untuk didaftarkan dan diperiksa. Karena pelaporan harta kekayaan dilakukan melalui suatu formulir resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka pemalsuan terhadap laporan kekayaan dapat dikategorikan dalam tindak pidana pemalsuan surat.<sup>17</sup> Tindak pidana pemalsuan surat sesungguhnya telah diatur dalam KUHP, yakni pada Pasal 263 KUHP. Pasal 263 KUHP menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau dapat diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah

---

<sup>16</sup> Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Memberdayakan Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi “*Studi tentang Efektivitas Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. Hal 50

<sup>17</sup> *Ibid*

isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

...

Surat ialah segala surat baik yang ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis menggunakan mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsu tersebut haruslah surat yang menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain), surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan masih banyak lagi). Perbuatan yang diancam disini ialah membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Memalsu surat ialah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Mengenai caranya dapat bermacam-macam, dapat pula dilakukan dengan cara mengurangkan, menambah, atau merubah sesuatu dari surat itu. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, serta juga harus dapat mendatangkan suatu kerugian.<sup>18</sup>

## **B. Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Penyelenggara Negara yang Tidak Menyerahkan Laporan Harta Kekayaannya Maupun Penyelenggara Negara yang dengan Sengaja Salah Melaporkan Harta Kekayaannya**

### **1. Sanksi Administratif Terlalu Lemah dan Sulit Untuk Diterapkan**

#### **a. Kewajiban bagi Penyelenggara Negara belum diimbangi dengan kewenangan KPK**

Kewajiban dan sanksi tentang LHKPN dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, sekilas memang tidak menunjukkan adanya permasalahan. Namun bila kita teliti lebih lanjut, bisa kita temukan sebuah permasalahan. Norma dalam undang-undang tersebut tidak tegas. Ketidaktegasan tersebut dalam Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang hanya menggunakan norma kewajiban Penyelenggara Negara tanpa diimbangi dengan norma

---

<sup>18</sup> Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1995. Hal 196

kewenangan lembaga pelaksananya. UU Nomor 28 Tahun 1999 telah menyembunyikan atau tidak menjelaskan lembaga yang berwenang memeriksa dan memastikan dilaporkan dan diumumkan LHKPN, serta memberi sanksi bagi Penyelenggara Negara tersebut.

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, menjelaskan mengenai kewenangan KPK untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.<sup>19</sup> Namun tidak satupun pasal yang memberikan kewenangan bagi KPK untuk ikut menegakan sanksi bagi penyelenggara Negara yang melanggar kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaan. Bila ada yang melanggar kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya, maka KPK hanya dapat memberikan daftar kepatuhan yang berisi orang yang patuh dan yang tidak patuh LHKPN dalam suatu instansi kepada instansi yang berjatuh untuk dijatuhi sanksi.<sup>20</sup> Namun realita yang ada, jarang kita jumpai atasan penyelenggara negara yang memberikan sanksi yang tegas bagi anak buahnya yang melanggar kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya.

**b. Sanksi Administratif tidak mengikat keseluruhan Penyelenggara Negara**

Pasal 20 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 1999, menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif yang berlaku. Sanksi administratif hanya dapat dikenakan bagi Penyelenggara Negara yang merupakan pegawai negeri baik sipil maupun anggota TNI maupun POLRI. Karena hanya Penyelenggara Negara dalam kategori itulah yang masuk dalam wilayah pengaturan hukum administratif Negara, baik sistem kepegawaiannya maupun pendisiplinannya. Sanksi administratif sulit diterapkan bagi Penyelenggara Negara yang berasal dari pejabat Negara, khususnya mereka yang dipilih maupun diangkat melalui mekanisme politik, karena tidak terikat pada sistem kepegawaian yang ada.<sup>21</sup> Sanksi ini juga sulit diterapkan khususnya bila Penyelenggara Negara tersebut

---

<sup>19</sup> Pasal 13 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>20</sup> Miracle, *Op.Cit*, hal 36.

<sup>21</sup> Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan *Op.Cit*. Hal 26

telah mengakhiri jabatannya. Sebagai contoh seorang Kepala Kepolisian Daerah yang masa jabatannya telah habis dan pensiun. Hal ini membuat status penyelenggara Negaranya hilang yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mempunyai status hukum dan kewajiban hukum lagi. Sehingga ketika status hukumnya sudah bukan Penyelenggara Negara lagi, atasan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif.

Sekalipun dalam KUHP mengatur mengenai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan (Pasal 216 KUHP) dan kejahatan pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP). Ketentuan sanksi pidana ini dikesampingkan dengan adanya *asas lex specialist* dengan diaturnya Pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa sanksi administratif bagi Penyelenggara Negara yang melanggar pasal 5 ayat 3 untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya.

## **2. Asas *Lex Specialis* dianggap berlaku dengan adanya Pasal 20 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 1999**

KUHP sebenarnya memberikan kewajiban bagi setiap orang pada umumnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya bagi kewajibannya untuk menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu. Pasal 216 KUHP ini sangat sering digunakan semasa LHKPN menjadi kewenangan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sebagai rujukan ancaman hukuman. Ketua Sub Komisi Yudikatif KPKPN, Chairul Imam, pernah menyatakan bahwa Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta kekayaan berarti tidak memenuhi permintaan pejabat pengawas berdasarkan UU, karenanya masuk kategori tindak pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP.<sup>22</sup> KPKPN pernah merealisasikan, dengan melaporkan Bupati Tana Toraja, setelah terkatung-katung sekian lama sampai KPKPN dibubarkan, barulah pada April tahun 2006 Bareskrim mengadakan gelar perkara tentang kasus ini dan kasus ini akhirnya dihentikan. Menurut Bareskrim, yang saat itu menghadirkan saksi ahli Andi Hamzah,

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal 25

menyatakan bahwa terhadap pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*, Pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 telah mengatur secara spesifik sanksi bagi perbuatan Bupati Tana Toraja.<sup>23</sup>

Sudikno<sup>24</sup> menjelaskan bahwa dari segi isinya hukum dibagi menjadi *lex generalis* dan *lex specialis*. *Lex generalis* adalah hukum umum dan merupakan dasar, sedangkan *lex specialis* adalah hukum khusus, yaitu yang menyimpang dari *lex generalis*. *Lex generalis* merupakan dasar dari *lex specialis*. Penulis berpendapat bahwa asas *lex specialis* memang dapat berlaku dengan adanya pengaturan pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 ini. Pasal 216 KUHP mengatur secara umum terkait tentang hal kewajiban untuk menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, namun tidak spesifik atau mengatur secara khusus terkait dengan kewajiban penyelenggara negara melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya.

Kewajiban melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan bagi penyelenggara Negara lebih spesifik tertera dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 pada pasal 5 Ayat 3. Dengan dikesampingkannya pasal 216 KUHP, maka sanksi pidana menurut penulis memanglah tidak dapat diterapkan lagi untuk penyelenggara Negara yang tidak mematuhi perintah Pasal 5 Ayat 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 ini, karena dalam pengaturan sanksinya yakni dalam Pasal 20, sanksinya adalah sanksi administratif. Hal ini juga dapat kita lihat dengan reaksi KPK yang hingga saat ini tidak pernah menerapkan pasal-pasal dalam KUHP bagi penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya dan menganggap bahwa tidak ada sanksi pidana bagi penyelenggara Negara yang tidak patuh melaporkan harta kekayaannya.<sup>25</sup>

### **C. Pengaturan Sanksi Pidana dalam Mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Mekanisme LHKPN sudah berjalan dengan baik, namun pelaksanaannya juga terdapat banyak celah hukum yang dapat mengurangi efektivitas

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal 26

<sup>24</sup> Sudikno, *Op.Cit.* Hal 129

<sup>25</sup> Miracle, *Op.Cit.* Hal 36

berlakunya mekanisme ini. Sekalipun kewajiban ini telah disertai dengan sanksi hukum yakni sanksi administrative sebagaimana yang diamanatkan Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, namun sebagaimana dalam pembahasan diatas sanksi administrative ini mempunyai banyak kelemahan. Lemahnya sanksi administrative sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis berpendapat bahwa sudah menjadi momentum yang tepat untuk melengkapi rumusan pasal 20 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tersebut beserta dengan sanksi pidana. Gambaran mengenai perbandingan sanksi dalam mekanisme LHKPN di berbagai Negara dapat memberikan masukan bagi kita.

**Tabel 4.1**  
**Sanksi terhadap pelanggaran laporan harta kekayaan**  
**di berbagai Negara**

No.	Negara	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
1	Korea Selatan	Tidak melaporkan kekayaan tepat waktu	Diberi peringatan oleh <i>Ministry of Internal Affairs</i>
		Memberikan keterangan palsu	Ditindaklanjuti dengan investigasi hukum
2	Filipina	Menolak melaporkan kekayaan atau memberikan keterangan palsu	Pelanggaran UU bisa dikenai denda tidak lebih dari 6 bulan gaji, pemberhentian tidak lebih dari 1 tahun, atau pencopotan dari jabatan, tergantung keasalannya
3	Thailand	Menolak melaporkan kekayaan	Dibebastugaskan dari jabatannya dan dilarang menjadi Penyelenggara Negara 5 Tahun sejak tanggal pembeastugasan tersebut
		Memberikan keterangan palsu	Dipenjara tidak lebih dari 6 bulan, denda tidak lebih dari 10.000 baht
4	Kenya	Menolak melaporkan kekayaan atau memberikan keterangan palsu	Denda tidak lebih dari 1 juta schilling atau penjara 1 tahun, atau keduanya
5	Albania	Menolak melaporkan kekayaan	Pemberhentian dari jabatan, serta denda dan kurungan hingga 6 bulan
		Memberikan keterangan palsu	Pidana sesuai hukum pidana tentang pemalsuan surat
6	Amerika Serikat	Menolak melaporkan kekayaan	Kejaksaan melalui civil action Pimpinan Instansi memberhentikan/ mengambil tindakan lain
		Memberikan keterangan palsu	Pidana sesuai dengan hukum pidana tentang pemalsuan surat
7	Singapura	Menolak melaporkan kekayaan atau memberikan keterangan palsu	Mendapatkan hukuman disiplin hingga pemecatan

Sumber : Data Tersier, diolah, 2012

Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Memberdayakan Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi “Studi tentang Efektivitas Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hal 121

### 1. Sanksi Pidana bagi Penyelenggara Negara yang Tidak Melaporkan Harta Kekayaannya

Perbandingan sanksi dalam mekanisme LHKPN dengan beberapa Negara diatas (Tabel 4.1) dapat menjadi gambaran bagi Indonesia dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelanggaran ini. Dari tujuh Negara perbandingan, hanya Albania dan Kenya yang menjatuhkan sanksi selain administratif, yakni berupa denda tidak lebih dari 1 juta schilling atau penjara 1 tahun, atau keduanya (Kenya), Pemberhentian dari jabatan, serta denda dan kurungan hingga 6 bulan (Albania). Sekalipun yang menjadi mayoritas sanksi dari Negara perbandingan tersebut adalah sanksi administrative, namun sanksi tersebut terlalu lemah untuk berlaku di Indonesia. Pidana di Negara Albania dan Kenya yakni yang berupa pidana denda dapat menjadi gambaran bagi upaya pengaturan sanksi pidana dalam LHKPN khususnya yang tidak taat melaporkan harta kekayaannya.

Pasal 216 KUHP dapat menjadi referensi pengaturan sanksi pidana bagi penyelenggara Negara yang tidak taat melaporkan harta kekayaannya. Namun pendapat yang menyatakan pasal ini menjadi dikesampingkan (berlaku *asas lex specialis derogate legi generalis*) dengan adanya pengaturan sanksi administrative dalam pasal 20 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 dapat diusahakan dengan memberikan definisi yang lebih khusus dan rinci dalam redaksional pasal 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut. Bentuk sanksi pidana yang ada yakni dengan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah perlu dikaji ulang sesuai dengan keadaan yang sekarang ini.

Penulis berpendapat bahwa sanksi pidana penjara yang tepat adalah pidana penjara minimal enam bulan dan maksimal satu tahun. Pilihan maksimal satu tahun adalah merupakan perbandingan dari sanksi pidana terkecil atau minimal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 5 UU No 20 Tahun 2001 memberikan hukuman Pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun dan atau denda. Selain itu, penulis berpendapat bahwa pidana denda yang ada



dalam pasal 216 KUHP yakni pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah sudah tentu perlu dikaji ulang dengan keadaan sekarang ini. Menurut penulis, pidana denda yang cukup tepat adalah pidana denda minimal lima juta rupiah dan maksimal sebesar lima puluh juta rupiah. Pertimbangannya adalah, nominal lima puluh juta rupiah merupakan nominal pidana denda terkecil dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yakni pada pasal 3, pasal 5, pasal 9, pasal 11, dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sehingga bila penulis simpulkan, maka pengaturan sanksi pidana bagi penyelenggara Negara yang tidak taat melaporkan harta kekayaannya dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah “Barang Siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 3 (melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat), diancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun dan pidana denda paling sedikit lima juta rupiah dan paling banyak lima puluh juta rupiah. ”

## **2. Sanksi Pidana bagi Penyelenggara Negara yang Dengan Sengaja Salah Melaporkan Harta Kekayaannya**

Pelanggaran terhadap mekanisme Laporan Harta Kekayaan, tidak hanya dapat berupa penolakan atau tidak taat dalam melaporkan harta kekayaannya. Namun realitanya, penyelenggara Negara seringkali mengakali Laporan Harta Kekayaannya. Bentuk pengakalan ini dapat berupa<sup>26</sup> menyembunyikan kekayaan tertentu, mengubah asal-usul dari kekayaan yang sebenarnya, mengurangi nominal kekayaan tertentu secara sepihak, dan praktek-praktek lainnya. Perbuatan pengakalan laporan harta kekayaan tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk pemalsuan.

Sebenarnya, tindak pidana pemalsuan telah diatur dalam pasal 263 KUHP. Pasal ini dapat menjadi sumber referensi bagi pengaturan sanksi pidana dalam mekanisme LHKPN. Khususnya bagi penyelenggara Negara

---

<sup>26</sup> Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan *Op.Cit.* Hal 50

yang dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaannya. Mengenai sanksi hukuman pidana penjara maksimal enam tahun dalam Pasal 216 KUHP menurut penulis perlu mendapat kajian lebih jauh.

Penulis berpendapat bahwa pidana penjara yang tepat dalam kasus ini adalah berupa pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal enam tahun penjara. Pilihan pidana penjara minimal, mengikuti pidana penjara maksimal satu tahun yang disarankan penulis bagi penyelenggara Negara yang tidak taat atau menolak melaporkan harta kekayaannya. Mengenai pidana maksimal enam tahun penjara, penulis mengikuti pengaturan sanksi pidana yang telah ada, yakni tentang pemalsuan yang diatur dalam pasal 263 KUHP.

Selain itu perlu dipertimbangkan pula adanya sanksi pidana denda. Menurut penulis, pidana denda yang cocok bagi pengaturan saksi pidana dalam mekanisme LHKPN ini adalah dengan pidana denda minimal lima puluh juta rupiah dan maksimal denda dua ratus lima puluh juta rupiah. Dasar penulis menyarankan sanksi ini adalah dengan adanya pengaturan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakter tindak pidana yang sama, yakni pemalsuan. Bila dapat penulis simpulkan, maka saran penulis bagi pengaturan sanksi pidana bagi penyelenggara Negara yang dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaannya adalah “Barang siapa dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaannya, baik dengan cara menyembunyikan kekayaan tertentu, mengubah asal-usul dari kekayaan yang sebenarnya, mengurangi nominal kekayaan tertentu secara sepihak, dan praktek-praktek lainnya diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun dan pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah.”

Selain itu penulis juga menyarankan agar tidak menutup kemungkinan, adanya pidana tambahan. Yakni berupa perampasan barang, yang dalam hal ini perampasan barang yang dengan sengaja tidak dilaporkan. Pidana tambahan berupa perampasan barang juga

diperbolehkan dalam pengaturan hukuman pidana dalam KUHP. Selain itu, pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai perampasan barang tertentu.

Penulis menggunakan istilah “barang siapa” dalam saran pengaturan sanksi pidana tersebut. Tujuannya adalah agar tidak ada kerancuan istilah “Penyelenggara Negara”, khususnya bagi penyelenggara Negara yang telah selesai menjabat. Sehingga aturan dari redaksional pasalnya, pengaturan ini mempunyai cakupan yang lebih luas sekalipun maksudnya ditujukan pada mekanisme laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Pengaturan sanksi pidana yang penulis sarankan ini mungkin dianggap sebagai sebuah upaya penalisasi yang berat. Namun sesuai yang penulis sampaikan sebelumnya, pengaturan sanksi pidana ini merupakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Tujuannya bukan semata-mata menghukum yang bersalah karena kesalahannya. Namun sanksi yang berat, harapannya dapat membuat takut atau mencegah penyelenggara Negara mempunyai niat untuk melanggar kewajiban melaporkan harta kekayaannya dengan benar.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Pengaturan Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Bagi Penyelenggara Negara yang Tidak Menyerahkan Laporan Harta Kekayaannya Maupun Penyelenggara Negara yang dengan Sengaja Salah Melaporkan Harta Kekayaannya**

Sanksi administrative dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi dalam mekanisme LHKPN terdapat dalam Pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Pasal 216 KUHP bagi penyelenggara Negara yang tidak taat melaporkan harta kekayaannya dan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan untuk penyelenggara Negara yang dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaannya. Namun sanksi pidana yang ada ini dianggap tidak berlaku dan dikesampingkan dengan adanya *asas lex*

*specialis derogate lex generalis* adanya pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang memberikan sanksi administrative.

**2. Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Penyelenggara Negara yang Tidak Menyerahkan Laporan Harta Kekayaannya Maupun Penyelenggara Negara yang dengan Sengaja Salah Melaporkan Harta Kekayaannya**

Sanksi administrative terlihat lemah dan sulit untuk diterapkan. Kelemahannya bahwa KPK tidak berwenang memberikan sanksi administrative dan sanksi administrative ini tidak berlaku bagi semua penyelenggara Negara, sebagai contoh anggota DPR yang mempunyai sistem kepegawaian yang berbeda. Sanksi administrative juga tidak dapat dikenakan bagi penyelenggara Negara yang telah mengakhiri masa jabatannya, karena statusnya yang sudah bukan penyelenggara Negara lagi. Sanksi hukum pidana yang mengatur mekanisme ini dikesampingkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa berlaku adanya *asas lex specialis derogate lex generalis* dengan adanya pasal 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang memberikan sanksi administrative.

**3. Pengaturan Sanksi Pidana dalam Mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Lemahnya sanksi administrative dan tidak dapat berlakunya sanksi pidana yang ada, membuat penulis menyarankan adanya peninjauan kembali terhadap berlakunya pasal 20 UU Nomor 28 tahun 1999 dan menyarankan adanya pengaturan sanksi pidana, khusus mengenai mekanisme LHKPN. “Barang Siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 3 (melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat), diancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun dan pidana denda paling sedikit lima juta rupiah dan paling banyak lima puluh juta rupiah” yakni bagi pelanggaran terhadap penolakan maupun tidak taat dalam melaporkan harta kekayaannya. Kemudian pengaturan sanksi bagi penyelenggara Negara yang dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaannya, yakni “Barang siapa dengan sengaja salah melaporkan harta kekayaannya, baik dengan cara menyembunyikan kekayaan tertentu, mengubah asal-usul dari kekayaan yang sebenarnya,

mengurangi nominal kekayaan tertentu secara sepihak, dan praktek-praktek lainnya diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun dan pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah.”

## B. Saran

Sanksi administratif yang ada dalam mekanisme LHKPN dianggap kurang berjalan maksimal dan terkesan percuma. Sehingga perlu diupayakan mengenai pentingnya sanksi yang lain yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku, yakni dapat berupa sanksi pidana dalam pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pidana memanglah merupakan *ultimum remedium* namun pemberian sanksi pidana ini tujuannya bukanlah pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, melainkan untuk sebagai upaya pencegahan. Sehingga menurut penulis, sudah saatnya mengkaji pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 dan melengkapinya dengan sanksi pidana, sehingga tujuan hukum yakni kemanfaatan dalam hal ini bermanfaat bagi upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sugandhi. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya. 1980.

## JURNAL

- Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Memberdayakan Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi “Studi tentang Efektivitas Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

## UNDANG-UNDANG

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**, Citra Umbara, Bandung, 2009.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Umbara, Bandung, 2009.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Umbara, Bandung, 2009.

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.**

## SKRIPSI/LAPORAN KULIAH KERJA LAPANG

Miracle M. A. A. S. Sihombing, *Pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Laporan Kuliah Kerja Lapangan tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

## INTERNET

Arhiem, *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (online)*, [http://hukumperbankan.blogspot.com/2009/07/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara\\_24.html](http://hukumperbankan.blogspot.com/2009/07/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara_24.html) (Kamis, 23 Agustus 2012)

Deni Marmos., 2011, *Korupsi (online)*, <http://denimarmos.Blogspot.com/2011/09/korupsi.html> (Jumat, 26 Juli 2012)

Ramidi, *KPKPN Pertanyakan Tindak Lanjut Polri*, TEMPO Interaktif, [www.tempo.co/read/news/2004/03/15/05540665/KPKPN-Pertanyakan-Tindak-Lanjut-Polri](http://www.tempo.co/read/news/2004/03/15/05540665/KPKPN-Pertanyakan-Tindak-Lanjut-Polri). (19 November 2012), 2004